

# Perbandingan Penggunaan Metode Sainte Lague dan Kuota Hare pada Negara Indonesia-Korea Selatan-Irak

Salsa Zahrotun

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

e-mail: [salzahrtun@gmail.com](mailto:salzahrtun@gmail.com)

**Abstract:** *This research discusses methods for calculating election votes. The aim of this research is to find out the differences in method use in each country. The use of election vote counting methods varies by country, the ones highlighted in this article are the Sainte Lague method and the Hare quota. Sainte Lague is converting the results of valid votes by dividing them using a certain number, while Hare quota is converting election results by reducing the results of valid votes by the price of one seat. In this research, differences in the use of vote conversion are due to the assumptions of each country regarding the effectiveness value of each method so that each country has its own method. In this study, it is stated about the differences in each country in using each election model, be it Saint Lague and Hare quota. Because the basis for using the election model is based on the conditions and political developments in each country. Although for example in Indonesia, Iraq and South Korea use their respective model choices. The model used still has advantages and disadvantages as evidence of the plurality of political problems in each country that are diverse. But regardless of the advantages and disadvantages, the use of the election model shows the seriousness of each country to improve its electoral democracy.*

**Keywords:** *Election; Sainte Lague; Hare Quota*

## Abstrak

Penelitian ini membahas tentang metode dalam perhitungan suara pemilu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan penggunaan metode pada tiap negara. Penggunaan metode perhitungan suara pemilu berbeda tiap negara, yang disoroti dalam artikel ini adalah metode *sainte lague* dan kuota hare. Sainte lague adalah mengkonversi hasil suara sah dengan membaginya menggunakan bilangan tertentu, sedangkan kuota hare adalah pengonversian hasil pemilu dengan mengurangi hasil suara sah dengan harga satu kursi. Dalam penelitian ini dikemukakan mengenai perbedaan dalam setiap negara dalam menggunakan masing-masing model pemilihan, baik itu saint lague dan kuota hare. Karena memang dasar penggunaan model pemilihan berdasarkan kondisi dan perkembangan politik di tiap negara. Meskipun sebagai contoh di Indonesia, Iraq dan Korea selatan menggunakan pilihan modelnya masing-masing. Tetaplah model yang digunakan memiliki kekurangan dan kelebihan sebagai

bukti pluralitas permasalahan politik di tiap negara yang beraneka macam. Tetapi terlepas dari kekurangan dan kelebihan, penggunaan model pemilihan menunjukkan keseriusan tiap negara untuk memperbaiki demokrasi pemilihannya.

**Kata kunci:** *Pemilu; Sainte Ligue; Kuota Hare*

## Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu momen penting dalam setiap negara demokratis di mana rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka. Pemilu bukan hanya sekadar proses politik, tetapi juga merupakan pesta demokrasi yang menentukan arah dan masa depan sebuah bangsa, dalam setiap pemilu para calon dari berbagai partai politik bersaing untuk mendapatkan dukungan rakyat. Kampanye identik dengan debat, diskusi, dan janji-janji untuk memperbaiki kondisi negara. Pemilih memiliki tanggung jawab untuk memilih calon yang dianggap mampu memimpin dengan baik dan mewakili kepentingan mereka. Tingkat partisipasi dalam Pemilu mencerminkan kesehatan demokrasi suatu negara. Semakin banyak partisipasi, semakin kuat legitimasi pemerintahan yang terpilih. Namun, rendahnya partisipasi dapat mengindikasikan ketidakpuasan rakyat terhadap sistem politik atau ketidakpedulian terhadap proses demokrasi. Pemilu tidak hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang mengekspresikan suara dan aspirasi rakyat. Setelah Pemilu, pemenang harus bertanggung jawab atas janji-janjinya dan bekerja untuk kepentingan bersama<sup>1</sup>. Demokrasi bukan hanya tentang proses, tetapi juga tentang hasil akhir yang mensejahterakan semua warga negara. Pemilu adalah tonggak penting dalam perjalanan demokrasi sebuah negara. Ini adalah saat di mana kekuatan rakyat untuk menentukan masa depan mereka diuji dan diperkuat. Melalui partisipasi aktif dan sistem pemilihan yang bijaksana, sebuah negara dapat melangkah maju menuju kemajuan dan keadilan bagi warganya.

Pemilihan umum (Pemilu) memegang peranan penting dalam negara-negara yang menganut prinsip demokrasi. Ini bukan hanya sekadar proses formal untuk memilih pemerintahan, tetapi juga

---

<sup>1</sup> A Majid and A Sugitanata, "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2021, <http://qaumiyah.org/index.php/qaumiyah/article/view/18>.

merupakan fondasi dari keseluruhan sistem demokratis. Pemilu memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Setiap suara memiliki nilai dan dapat memengaruhi hasil akhir. Ini memperkuat prinsip pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Pemilu adalah cara untuk memilih pemerintah yang mendapat legitimasi dari rakyat. Dengan dihasilkannya pemerintah yang dipilih secara demokratis, keputusan dan kebijakan yang diambil menjadi lebih sah dan lebih dapat diterima oleh masyarakat <sup>2</sup>.

Pemilu memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah yang sedang berkuasa. Dengan adanya siklus pemilihan yang teratur, rakyat memiliki mekanisme untuk menyampaikan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap kinerja pemerintah, sehingga mendorong akuntabilitas dan transparansi. Melalui Pemilu, berbagai kelompok masyarakat dapat diwakili secara adil dalam proses pembuatan keputusan. Partisipasi dalam Pemilu memungkinkan suara minoritas didengar dan memastikan bahwa kepentingan semua segmen masyarakat tercermin dalam pemerintahan yang terpilih. Pemilu memberikan jalur damai untuk perubahan politik. Dengan memberikan wadah bagi persaingan politik yang sah dan teratur, Pemilu mengurangi risiko konflik dan memfasilitasi pergantian kekuasaan secara damai <sup>3</sup>. Pemilu bukan hanya sekadar proses teknis, tetapi juga pijakan utama dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Melalui partisipasi aktif dalam Pemilu, rakyat memainkan peran vital dalam pembentukan masa depan negara mereka, sementara pemerintah yang terpilih diingatkan bahwa kekuasaan mereka berasal dari dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Pemilu 2024 telah menjadi sorotan publik yang serius. Di antara beragam narasi politik yang berkembang, salah satu cerita menarik adalah kegagalan Tuan Guru Bajang, seorang tokoh agama yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik, namun gagal mencapai kursi legislatif karena partainya tidak lolos ambang batas. Tuan Guru Bajang, yang dikenal sebagai figur spiritual di komunitasnya, memutuskan untuk memanfaatkan pengaruhnya untuk meraih

---

<sup>2</sup> D N Ramadhanti, "Demokrasi Dan Pemilu Indonesia Dalam Tinjauan Sosiologi Politik," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan* ..., 2022, <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1677>.

<sup>3</sup> Ibid.

dukungan politik dalam Pemilu 2024. Dia memimpin sebuah partai kecil yang berfokus pada platform moral dan nilai-nilai keagamaan. Meskipun memiliki popularitas yang kuat di kalangan pengikutnya, Tuan Guru Bajang dan partainya menghadapi tantangan besar dalam menghadapi kompetisi politik yang sengit. Faktor seperti kurangnya dana kampanye, infrastruktur politik yang lemah, dan kurangnya dukungan dari partai politik yang lebih besar menjadi hambatan besar bagi ambisi politiknya.

Partai Tuan Guru Bajang, meskipun berusaha keras untuk memperjuangkan visi dan misinya, akhirnya gagal memenuhi ambang batas yang ditetapkan oleh aturan Pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran dan popularitas seseorang di luar dunia politik belum tentu cukup untuk meraih sukses dalam konteks politik formal. Gagalnya partainya dalam Pemilu 2024 menjadi pengingat bahwa politik adalah ranah yang memerlukan strategi dan dukungan yang matang, bahkan bagi tokoh-tokoh spiritual yang memiliki pengikut yang besar<sup>4</sup>. Gagalnya TGB dalam Pemilu 2014 di landasi oleh berbagai faktor salah satunya adalah sistem perhitungan pemilu yang mengaruskan partai politik lolos ambang batas sehingga hasil suara dapat diikut seratakan dalam perhitungan pemilu.

Indonesia, sebagai negara demokratis dengan populasi yang besar telah melalui berbagai tahapan dalam memperbaiki dan menyesuaikan sistem pemilihan umumnya. Pada awal kemerdekaan Indonesia, sistem pemilihan umum yang digunakan adalah sistem tertutup di mana pemilih tidak memilih secara langsung, tetapi memilih wakil yang akan memilih atas nama mereka. Hal ini memungkinkan elit politik untuk memiliki kendali yang lebih besar atas proses pemilihan, meningkatkan risiko korupsi, dan kurangnya akuntabilitas.

Pada tahun 1971, Indonesia beralih ke sistem pemilihan terbuka di mana pemilih memberikan suara mereka langsung kepada kandidat. Meskipun demikian, sistem ini masih memiliki kelemahan, seperti rentan terhadap intimidasi dan pengaruh dari penguasa lokal, serta potensi untuk pemilih terpaksa memilih sesuai dengan tekanan dari pihak tertentu. Sejak pemilihan umum tahun 2004, Indonesia telah menggunakan sistem pemilihan langsung di mana pemilih memberikan suara langsung kepada kandidat atau partai politik. Ini dianggap sebagai

---

<sup>4</sup> Mochammad Zia Ulhaq, *Retorika Dakwah Dalam Politik Studi Kasus Tgb Muhammad Zainul Majdi*, Tesis, 2019.

langkah maju dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan mengurangi potensi manipulasi hasil pemilihan.

Evolusi metode suara pemilu di Indonesia mencerminkan komitmen untuk meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem demokratis negara ini. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, langkah-langkah ini menunjukkan kemajuan yang signifikan menuju proses pemilihan yang lebih adil dan representatif<sup>5</sup>.

Perubahan-perubahan tidak hanya terjadi pada sistem pemilunya tetapi juga metode dalam pengkonversian suara menjadi kursi legislatif dalam perjalanannya menuju sistem pemilihan yang lebih adil dan proporsional, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam metode perhitungan suara pemilu yang digunakan. Dua metode yang cukup terkenal adalah Metode Hare dan Metode Sainte-Laguë. Metode Hare pertama kali digunakan dalam pemilihan umum di Indonesia pada pemilihan legislatif tahun 2009. Pada saat itu, Indonesia telah memperhatikan pentingnya perubahan menuju sistem proporsional yang lebih baik dalam menentukan alokasi kursi di parlemen. Metode Sainte-Laguë pertama kali diperkenalkan dalam konteks pemilihan umum di Indonesia pada pemilihan legislatif tahun 2014.

Dua langkah ini diambil sebagai upaya untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan keadilan dalam alokasi kursi parlemen, dengan mengadopsi Metode Sainte-Laguë, Indonesia telah membuat langkah yang signifikan dalam meningkatkan proporsionalitas dan keadilan dalam sistem pemilihan umumnya. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut, penggunaan metode ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperbaiki proses demokrasi dan memastikan representasi yang lebih baik bagi rakyatnya<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> M I Latief et al., "Implikasi Sosiologis Pemilu Di Indonesia," *Prosiding Konferensi* ..., 2023, <https://www.pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/91>.

<sup>6</sup> IMANUR IMANI, ... *HASIL PEROLEHAN KURSI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PENGHITUNGAN SUARA SAINTE LAGUE DAN KUOTA HARE (Studi Pada Pemilu 2019 Di ...* (digilib.unila.ac.id, 2021), <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/60402>.

Perbedaan dalam menggunakan metode memunculkan berbagai dampak bagi pemilu dari tahun ke tahun, keputusan pemerintah mengganti metode dalam perhitungan suara tentu dilandasi oleh faktor-faktor yang seharusnya menguntungkan masyarakat namun masih terdapat kasus seperti Tuan Guru Bajang seperti terkesan suara rakyat yang memilihnya menjadi sampah demokrasi karena tidak di konversikan menjadi kursi legislatif.

## Metode Perhitungan Suara Pemilu

### a. Metode *Sainte Lague*

Metode *Sainte-Laguë* adalah sebuah metode yang digunakan dalam sistem pemilihan proporsional untuk mendistribusikan kursi di sebuah lembaga legislatif berdasarkan suara yang diperoleh oleh setiap partai atau calon. Metode *Sainte-Laguë*, yang dinamai dari André *Sainte-Laguë*, seorang matematikawan Prancis, menggunakan pembagi serangkaian angka ganjil untuk membagi jumlah suara yang diperoleh oleh setiap partai politik. Setiap partai politik memperoleh kursi pertamanya berdasarkan perbandingan suara yang diperolehnya. Selanjutnya, suara yang diperoleh oleh partai politik tersebut dibagi dengan bilangan ganjil berikutnya untuk menentukan peringkat partai politik selanjutnya<sup>7</sup>.

Metode *Sainte-Laguë* beroperasi dengan cara yang relatif sederhana. Pertama, total suara yang diterima oleh setiap partai atau calon dihitung. Kemudian, kursi di lembaga legislatif didistribusikan berdasarkan suara tersebut. Langkah selanjutnya adalah membagi jumlah suara yang diperoleh oleh setiap partai dengan serangkaian bilangan ganjil berturut-turut (1, 3, 5, 7, dan seterusnya) hingga jumlah kursi yang tersedia terpenuhi.

Setelah membagi, kursi diatribusikan kepada partai dengan hasil pembagian tertinggi di setiap langkah. Misalnya, jika setelah pembagian langkah pertama Partai A memiliki hasil bagi tertinggi, maka Partai A diberikan satu kursi. Proses ini terus berlanjut sampai seluruh kursi terisi.

---

<sup>7</sup> R Al-Hamdi, B E C Widodo, and T Sulaksono, "Modul Praktikum A Tata Kelola Pemilu (Teknik Menghitung Suara Menjadi Kursi Di Pemilu 2019 Dengan Metode *Sainte Lague* (Murni))," *The Journal Publishing*, 2021, <http://thejournalish.com/ojs/index.php/books/article/view/152>.

Salah satu keunggulan utama metode *Sainte-Laguë* adalah standar proporsionalitasnya. Metode ini cenderung memberikan representasi yang lebih akurat bagi partai politik atau kandidat berdasarkan dukungan yang mereka terima dari pemilih. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang populer dalam sistem pemilihan proporsional di berbagai negara<sup>8</sup>.

Metode *Sainte-Laguë* juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah rentan terhadap manipulasi. Beberapa kritikus mengatakan bahwa metode ini dapat memberikan insentif bagi partai-partai kecil untuk bergabung dengan partai yang lebih besar untuk memaksimalkan jumlah kursi yang mereka dapatkan. Selain itu, seperti halnya dengan banyak metode distribusi kursi lainnya, metode *Sainte-Laguë* juga bisa memunculkan bias geografis.

Metode *Sainte-Laguë* adalah salah satu metode yang penting dalam sistem pemilihan proporsional. Meskipun memiliki konsep sederhana, namun model ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap representasi politik dalam lembaga legislatif. Dengan memahami cara kerjanya dan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, kita dapat memahami bagaimana metode ini memengaruhi dinamika politik dalam konteks pemilihan umum.

Metode *Sainte-Lague* telah di pakai pemerintah indonesia dalam pengkonversian suara dengan berbagai keuntungan yang diperoleh. Metode *Sainte-Laguë* dikenal karena kemampuannya untuk mendistribusikan kursi secara proporsional berdasarkan suara yang diperoleh oleh setiap partai atau calon. Di Indonesia, di mana pluralitas politik cukup kuat dengan banyak partai politik yang bersaing, penting untuk memiliki sistem yang memungkinkan representasi yang adil bagi semua pemilih. Memberikan representasi yang proporsional terhadap suara yang diperoleh, metode *Sainte-Laguë* membantu meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan. Pemilih merasa bahwa suara mereka dihargai dan diwakili dengan benar dalam lembaga legislatif. Sistem

---

<sup>8</sup> M K D Sweinstani, "Formula Konversi Suara Sainte Lague Dan Dampaknya Pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019," *Jurnal Penelitian Politik*, 2020.

proporsional seperti metode *Sainte-Laguë* juga mendorong terciptanya koalisi dan kompromi politik. Dalam sistem ini, seringkali tidak ada satu partai yang memperoleh mayoritas mutlak, yang berarti partai harus bekerja sama dan bernegosiasi untuk membentuk pemerintahan yang stabil. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia terlibat dalam berbagai forum dan organisasi internasional di mana pemilihan proporsional adalah norma.

Penerapan metode yang sama dengan negara-negara lain, Indonesia dapat memperkuat legitimasinya sebagai anggota masyarakat internasional dan memfasilitasi kerja sama di tingkat global. Seiring dengan proses reformasi demokrasi yang dimulai pada akhir 1990-an, Indonesia bergerak menuju sistem yang lebih inklusif dan demokratis. Pemilihan proporsional dengan metode seperti *Sainte-Laguë* adalah salah satu langkah dalam memperkuat demokrasi dan memastikan partisipasi yang lebih luas dalam proses politik. Secara keseluruhan, penerapan metode *Sainte-Laguë* di Indonesia mencerminkan upaya untuk membangun sistem politik yang inklusif, proporsional, dan demokratis, yang mewakili keberagaman pendapat dan kepentingan masyarakat secara lebih akurat<sup>9</sup>.

**Cara perhitungan suara menggunakan metode *Sainte Laguë*:**

SAINTE LAGUE											
Parpol	Perolehan Suara	Bilangan Pembagian			Perolehan Kursi						
		/1	/3	/5	I	II	III	IV	V	VI	VII
A	7.150	7.150	2.383	477	●				●		
B	3.800	3.800	1.267				●				
C	3.600	3.600	1.200					●			
D	4.050	4.050	1.350		●						●
E	1.400	1.400	467							●	
Jumlah	20	Sainte Laguë									7

Perolehan suarah sah 20.000, suara tiap parpol dibagi menggunakan bilangan ganjil, setelah di bagi maka diurutkan berdasarkan nilai tertinggi setelah hasil pembagian, bisa dilihat dalam tabel urutan pertama 7.150 (parpol A), 4.050 (parpol D),

<sup>9</sup> J R Freeman, “Decision Theory and Electoral Reform in Sweden: The Modification of the Sainte Laguë Formula,” *Comparative Political Studies*, 1977, <https://doi.org/10.1177/001041407701000207>.



3.800 (parpol B), 3.600 (parpol C), 2.383 (parpol A), 1.400 (parpol E), 1.350 (parpol D).

**b. Metode *Kuota Hare***

Metode *Kuota Hare*, yang dinamai dari ahli matematika Britania Raya, Thomas Hare, adalah salah satu metode yang digunakan dalam sistem pemilihan proporsional untuk mendistribusikan kursi di sebuah lembaga legislatif. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi prinsip dasar Metode *Kuota Hare*, cara kerjanya, dan implikasinya dalam konteks politik modern<sup>10</sup>. Metode *Kuota Hare* beroperasi dengan menggunakan kuota yang ditentukan berdasarkan jumlah suara yang diterima oleh setiap partai atau calon. Kuota ini adalah jumlah suara yang diperlukan bagi sebuah partai atau calon untuk mendapatkan satu kursi. Proses distribusi kursi dimulai dengan menghitung kuota Hare menggunakan rumus<sup>11</sup>.

Metode *Kuota Hare* memiliki beberapa implikasi politik yang signifikan. Pertama, metode ini memastikan representasi proporsional bagi partai politik atau calon berdasarkan dukungan yang mereka terima dari pemilih. Ini membantu mengurangi distorsi dalam representasi politik yang sering terjadi dalam sistem pemilihan mayoritas. Metode *Kuota Hare* mendorong partai-partai politik untuk memperjuangkan dukungan yang lebih luas, karena semakin banyak suara yang diperoleh, semakin besar peluang mereka untuk mendapatkan kursi di lembaga legislatif. Seperti metode distribusi kursi lainnya, Metode *Kuota Hare* juga memiliki kelemahan. Misalnya, dalam lembaga legislatif yang besar dengan banyak kursi, proses distribusi kursi menggunakan metode ini dapat menjadi rumit dan memakan waktu. Metode *Kuota Hare* adalah salah satu

---

<sup>10</sup> IMANI, ... HASIL PEROLEHAN KURSI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PENGHITUNGAN SUARA SAINTE LAGUE DAN KUOTA HARE (*Studi Pada Pemilu 2019 Di ....*

<sup>11</sup> A K PUTRI, ... METODE PENGHITUNGAN SUARA DENGAN MENGGUNAKAN HARE SYSTEM PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI DPRD KOTA YOGYAKARTA (dspace.uii.ac.id, 2018).

metode penting dalam sistem pemilihan proporsional<sup>12</sup>. Penggunaan kuota yang ditentukan berdasarkan jumlah suara, metode ini membantu memastikan representasi yang lebih adil bagi partai politik atau calon. Meskipun memiliki kelebihan dan kelemahan, Metode Kuota Hare tetap menjadi pilihan yang populer dalam konteks sistem pemilihan proporsional di berbagai negara.

Indonesia pernah menggunakan metode ini dalam pemilunya, karena beberapa alasan. Saat Indonesia masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda, pengaruh politik Belanda yang mencakup sistem pemilihan proporsional, termasuk Metode Kuota Hare, turut memengaruhi struktur politik Indonesia. Ketika Indonesia meraih kemerdekaannya, banyak prinsip dan metode dari masa kolonial yang tetap dipertahankan, termasuk dalam konteks sistem pemilihan. Indonesia mempertahankan sebagian besar struktur politik yang sudah ada, termasuk sistem pemilihan proporsional dengan Metode Kuota Hare.<sup>13</sup> Hal ini memungkinkan adanya keberlanjutan dalam proses politik dan administratif, yang penting untuk stabilitas negara yang baru merdeka. Pemilihan umum dengan Metode Kuota Hare memberikan representasi proporsional bagi partai politik atau calon berdasarkan dukungan yang mereka terima dari pemilih. Ini memungkinkan inklusivitas dan pluralitas dalam proses politik, yang penting mengingat keberagaman etnis, budaya, dan agama di Indonesia. Penggunaan Metode *Kuota Hare* juga dipandang sebagai cara untuk meningkatkan legitimasi demokratis pemerintah.

Pemberian representasi yang adil bagi semua pemilih, pemerintah Indonesia dapat memperkuat legitimasinya di mata rakyat dan di tingkat internasional. Penggunaan Metode *Kuota Hare* juga tercermin dari tradisi politik dan kebiasaan yang sudah mapan di Indonesia. Meskipun telah terjadi beberapa

---

<sup>12</sup> IMANI, ... *HASIL PEROLEHAN KURSI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PENGHITUNGAN SUARA SAINTE LAGUE DAN KUOTA HARE (Studi Pada Pemilu 2019 Di ...*

<sup>13</sup> B F Hantoro, "... METODE KONVERSI SUARA TERHADAP PROPORSIONALITAS PEROLEHAN KURSI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN ...," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2021.

perubahan dalam sistem pemilihan seiring waktu, metode ini telah menjadi bagian integral dari proses politik Indonesia, meskipun Indonesia saat ini menggunakan metode pemilihan berbeda dalam sistem pemilihan proporsionalnya, seperti sistem *D'Hondt*, penggunaan Metode Kuota Hare pada masa lalu mencerminkan kompleksitas sejarah politik Indonesia dan warisan dari masa kolonial<sup>14</sup>.

Cara Perhitungan Suara menggunakan metode Kuota Hare:

BBP	2.857	Kuota Hare			Perolehan Kursi							Total Kursi
Parpol	Perolehan Suara	1	2	3	I	II	III	IV	V	VI	VII	
A	7.150	7.150	4.293	1.436	●	●				●		3
B	3.800	3.800	943	-				●				1
C	3.600	3.600	743	-					●			1
D	4.050	4.050	1.193	-			●					1
E	1.400	1.400	-	-							●	1
Jumlah	20	Kuota Hare										7
KUOTA HARE												

Jumlah total suara adalah 20.000, terdapat 7 kursi legislatif ( $20.000:7=2.857$ ) kita sebut dengan BBP merupakan harga satu kursi. Langkah-langkah :

1. Perolehan suara sah partai politik dibagi harga satu kursi
2. Sisa perolehan dari tahap pertama dengan merujuk pada jumlah sisa suara sah terbanyak.

Proses pengkonversian kursi :

- Parpol A mendapat sah  $7.150-2.857=4.293-2.857=1.436$  (mendapat 3 kursi)
- Parpol B mendapat sah  $3.800-2.857= 943$  (mendapat 1 kursi)
- Parpol C mendapat sah  $3.600-2.857= 743$  (mendapat 1 kursi)
- Parpol D mendapat sah  $4.050-2.857= 1.193$  (mendapat 1 kursi)
- Parpol E mendapat sah  $1.400-2.857=-$  (tidak mendapat kursi)

<sup>14</sup> PUTRI, ... METODE PENGHITUNGAN SUARA DENGAN MENGGUNAKAN HARE SYSTEM PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI DPRD KOTA YOGYAKARTA.

## **Penggunaan Metode Perhitungan Suara di Negara Korea Selatan dan Irak**

### **a. Korea Selatan**

Korea Selatan, sebuah negara yang terletak di Semenanjung Korea, telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan politik yang penting di Asia Timur. Dalam artikel ini, kami akan menjelajahi bentuk negara, sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, dan cabang kekuasaan yang ada di Korea Selatan<sup>15</sup>.

Korea Selatan adalah sebuah negara republik konstitusional dengan sistem presidensial. Sejak berakhirnya Perang Korea pada tahun 1953, Korea Selatan telah mempertahankan kedaulatannya sebagai negara yang terpisah dari Korea Utara. Negara ini terdiri dari 9 provinsi dan 7 kota metropolitan yang dipimpin oleh pemerintah pusat di ibu kota, Seoul. Korea Selatan memiliki sistem pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi yang disetujui pada tahun 1987, yang menetapkan dasar bagi struktur politik dan pembagian kekuasaan di negara ini. Konstitusi ini juga menjamin hak-hak dasar warga negara dan mengatur proses pemilihan umum. Pemerintahan Korea Selatan adalah sebuah republik presidensial di mana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun dan memiliki kekuasaan eksekutif yang luas, termasuk dalam pengangkatan kabinet dan pembuatan kebijakan.

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan kabinetnya. Presiden adalah pemimpin tertinggi negara dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan negara. Kabinet, yang dipimpin oleh perdana menteri, bertugas mengawasi departemen-departemen pemerintah dan melaksanakan keputusan presiden. Majelis Nasional adalah badan legislatif nasional yang terdiri dari 300 anggota, yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan empat tahun. Majelis Nasional bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang

---

<sup>15</sup> B Setiyono, M Adnan, and L Astrika, *Gerakan Anti Korupsi: Perbandingan Antara Korea Selatan Dan Indonesia* (books.google.com, 2024).

dan pengawasan pemerintah. Sistem yudisial Korea Selatan terdiri dari pengadilan-pengadilan yang independen. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara ini dan bertanggung jawab atas penafsiran konstitusi dan undang-undang.

Korea Selatan memiliki sistem pemerintahan yang stabil dan terorganisir dengan baik, yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Dengan struktur pemerintahan yang terbagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, negara ini telah berhasil membangun institusi-institusi yang kuat untuk mengelola urusan dalam negeri dan menjaga stabilitas politik. Dengan demikian, Korea Selatan terus menjadi salah satu kekuatan utama di kawasan Asia Timur<sup>16</sup>.

Korea Selatan, sebuah negara yang dikenal dengan kemajuan ekonomi dan perkembangan teknologinya, juga memiliki sistem pemilihan yang kompleks dan beragam. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan tentang sistem pemilihan dan metode perhitungan suara yang digunakan di Korea Selatan, serta beberapa aspek penting yang mempengaruhi proses pemilihan di negara tersebut.

Korea Selatan memiliki sistem pemerintahan demokratis yang berdasarkan pada prinsip pemilihan umum multi-partai. Majelis Nasional Korea Selatan, badan legislatif negara tersebut, terdiri dari anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Para anggota ini memegang peran penting dalam proses pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintahan.

Korea Selatan menggunakan sistem pemilihan proporsional dengan metode perhitungan suara yang disebut sebagai metode Kuota Hare. Metode Kuota Hare adalah metode yang digunakan untuk menghitung alokasi kursi di sebuah lembaga legislatif berdasarkan jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing partai politik. Metode ini menghasilkan distribusi kursi yang proporsional dengan jumlah

---

<sup>16</sup> Y A Mahardi, "... KETATANEGARAAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Kajian Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan)," *Repository.Iainbengkulu.Ac.Id*, n.d.

suara yang diperoleh oleh setiap partai. Seperti halnya di negara lain, Korea Selatan juga menghadapi tantangan dalam menjalankan proses pemilihan. Salah satu tantangan utama adalah penyebaran informasi yang merugikan dan berita palsu yang dapat memengaruhi opini publik. Selain itu, terdapat juga kekhawatiran tentang pengaruh keuangan yang kuat dari perusahaan besar (*chaebol*) dalam politik, yang dapat mengganggu integritas proses pemilihan.

Model pemilhan Kuota Hare di Korea Selatan pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan penggunaan model Kuota Hare di Korea Selatan pertama, memberikan keadilan bagi partai kecil dan menengah, kedua meningkatkan representasi politik yang beragam, ketiga, mendorong partisipasi pemilih dan terakhir mengurangi dominasi partai besar. Adapun kekurangan model ini terletak pada sistemnya yang kompleks dan membingungkan para pemilih dan meningkatkan fragmentasi parlemen. Hal ini dikarenakan banyak partai kecil bisa masuk yang justru mempersulit proses legislasi karena perlunya banyak suara yang harus disatukan.

Pemerintah Korea Selatan terus melakukan reformasi untuk meningkatkan integritas pemilihan dan memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan lancar. Upaya juga dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik dari berbagai segmen masyarakat, termasuk kaum muda dan minoritas. Korea Selatan telah berhasil membangun sistem pemilihan yang relatif kuat dan representatif. Dengan menggunakan metode perhitungan suara yang proporsional dan terus melakukan reformasi untuk meningkatkan integritas pemilihan, negara ini terus berusaha menuju demokrasi yang lebih matang dan inklusif. Dengan partisipasi aktif dari warga negara dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, Korea Selatan dapat terus berkembang sebagai salah satu negara demokratis terkemuka di dunia.

## **b. Irak**

Irak, sebuah negara yang terletak di wilayah Timur Tengah, memiliki sistem pemerintahan yang kompleks dan struktur kekuasaan yang unik. Dalam artikel ini, kami akan

menjelajahi bentuk negara, sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, dan cabang kekuasaan yang ada di Irak.

Irak adalah sebuah republik federal yang terdiri dari 19 provinsi. Sejak pembentukannya pada tahun 1920-an, negara ini telah mengalami berbagai perubahan dalam struktur politiknya. Namun, pada dasarnya, Irak adalah sebuah negara yang terdiri dari wilayah-wilayah otonom yang diatur oleh pemerintah pusat di Baghdad. Irak memiliki sistem pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi yang disetujui pada tahun 2005<sup>17</sup>. Konstitusi ini menetapkan dasar bagi pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah regional, serta antara cabang-cabang pemerintah. Pemerintahan Irak adalah sebuah republik parlementer dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan<sup>18</sup>. Presiden dipilih oleh Majelis Perwakilan, yang merupakan badan legislatif nasional, untuk masa jabatan empat tahun. Perdana Menteri, di sisi lain, adalah kepala eksekutif dan dipilih oleh Majelis Perwakilan dari partai atau koalisi mayoritas.

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan perdana menteri. Presiden bertanggung jawab atas tugas-tugas seremonial dan mewakili negara secara internasional, sementara perdana menteri adalah kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan.

Majelis Perwakilan adalah badan legislatif nasional yang bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintah. Anggota Majelis Perwakilan dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan empat tahun. Sistem yudisial Irak terdiri dari pengadilan-pengadilan yang independen. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara ini dan bertanggung jawab atas penafsiran konstitusi dan undang-undang. Irak memiliki sistem pemerintahan yang kompleks dengan struktur kekuasaan yang terbagi antara pemerintah federal dan pemerintah regional. Meskipun telah mengalami tantangan dan konflik, Irak terus berusaha

---

<sup>17</sup> M Al Qautsar Pratama, "Kepemimpinan Dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Al-Khattab," *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 2, no. 1 (2018): 59, <https://doi.org/10.30829/j.v2i1.1496>.

<sup>18</sup> wiki, "Politics of Iraq," n.d.

membangun institusi yang kuat dan menjaga stabilitas politik di tengah dinamika regional yang kompleks. Dengan peran masyarakat internasional dan komitmen dalam proses demokratisasi, Irak berharap dapat mencapai kemajuan yang lebih besar dalam pembangunan dan rekonsiliasi nasional<sup>19</sup>. Irak menggunakan metode pemilihan proporsional untuk mendistribusikan kursi di Majelis Perwakilan. Salah satu metode yang digunakan adalah metode Sainte-Laguë, yang diadaptasi dari model yang serupa yang digunakan dalam pemilihan di banyak negara Eropa. Metode ini menghitung jumlah kursi yang diberikan kepada setiap partai berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya secara proporsional<sup>20</sup>.

Meskipun Irak telah melaksanakan beberapa pemilihan umum yang relatif sukses sejak invasi AS pada tahun 2003, proses pemilihan tidak selalu berjalan lancar. Tantangan utama termasuk ancaman keamanan, intimidasi politik, dan ketegangan antar-kelompok yang sering kali mempersulit proses pemungutan suara dan perhitungan hasilnya. Selain itu, masih ada kekhawatiran tentang keadilan dan transparansi dalam pemilihan, terutama terkait dengan masalah seperti penipuan pemilihan dan pembelian suara<sup>21</sup>.

Irak terus berjuang untuk memperkuat institusi demokratisnya dan memastikan pemilihan umum yang adil dan transparan. Reformasi terus dilakukan untuk meningkatkan integritas pemilihan dan memperkuat partisipasi politik dari berbagai kelompok masyarakat. Dengan melanjutkan upaya ini, Irak berharap untuk membangun sistem politik yang stabil dan representatif yang dapat mewakili kepentingan semua warga negaranya.

Irak telah menghadapi banyak tantangan dalam membangun sistem politiknya setelah tahun 2003. Meskipun demikian, negara ini telah melakukan langkah-langkah penting

---

<sup>19</sup> kemenlu, "Republik Iraq," n.d.

<sup>20</sup> Sultoni Fikri and Anang Fajrul Ukhwaluddin, "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Iran," *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (2022): 56–65, <https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.139>.

<sup>21</sup> kemenlu, "Republik Iraq."



menuju pemilihan umum yang lebih inklusif dan representatif. Dengan terus melakukan reformasi dan memperkuat proses pemilihan, Irak berpotensi untuk memperkuat fondasi demokratisnya dan membawa masa depan yang lebih cerah bagi warganya.

### **Efisiensi mempengaruhi penggunaan metode**

Teori Analisis Ekonomi dalam Hukum juga dikenal sebagai "Analisis Ekonomi Hukum" digunakan untuk menilai efisiensi, yang merupakan konsep ekonomi. Ekonomi umumnya memberikan teori perilaku untuk memprediksi reaksi orang terhadap hukuman. Dalam mazhab neoklasik, asas efisiensi berfungsi sebagai satu-satunya kriteria untuk menilai teori ekonomi. Efisiensi mengacu pada cara sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan tertentu<sup>22</sup>. Oleh karena itu, sumber daya yang terbatas harus digunakan seoptimal mungkin untuk menghasilkan produk dan jasa yang paling memuaskan manusia<sup>23</sup>. Memaksimalkan adalah proses memilih alternatif terbaik dari tantangan yang ada<sup>24</sup>.

Teori efisiensi Pareto dan efisiensi Kaldor-Hicks adalah dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menakar tingkat efisiensi. Teori Pareto menganggap suatu pengaturan alokasi sumber daya efisien secara Pareto adalah ketika tidak mungkin untuk mengubah situasi sehingga setidaknya satu pihak menjadi lebih baik (lebih baik) tanpa membuat pihak lain menjadi lebih buruk (lebih buruk). Suatu kemajuan secara Pareto adalah suatu perubahan keadaan yang membuat satu pihak lebih baik tanpa ada pihak lain yang lebih buruk. Kemajuan secara Pareto juga dikenal sebagai "solusi menang-menang", dan artinya hanya ada satu pihak yang diuntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Namun, tujuan dari efisiensi Kaldor-Hicks adalah untuk menciptakan ukuran efisiensi yang lebih relevan dari efisiensi Pareto. Konsepnya

---

<sup>22</sup> Irene van Staveren, *"Efficiency"* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009).

<sup>23</sup> Peter Antonioni and Sean Masaki Flynn, *Economics for Dummies* (Chichester: John Wiley & Sons, 2011).

<sup>24</sup> Robert Cooter and Thomas Ulen, *Law and Economics* ((Boston: Addison Wesley, 2012).

adalah efisiensi yang membolehkan kehilangan uang sebagai hasil dari alokasi selama kehilangan uang tersebut diberikan kompensasi<sup>25</sup>.

Teori efisiensi dalam penentuan aturan menyoroti upaya untuk menghasilkan peraturan atau kebijakan yang paling efektif dan optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peraturan pemerintah hingga kebijakan organisasi. Teori efisiensi mendorong pemerintah atau organisasi untuk melakukan analisis biaya-manfaat sebelum menerapkan atau mengubah aturan. Dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari berbagai alternatif kebijakan, keputusan dapat diambil untuk memastikan bahwa aturan yang ditetapkan akan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat atau organisasi.

Penentuan aturan yang efisien memperhatikan penggunaan sumber daya yang optimal. Ini dapat mencakup alokasi dana, tenaga kerja, waktu, dan infrastruktur untuk mendukung implementasi aturan tersebut. Pemilihan aturan yang meminimalkan pemborosan sumber daya menjadi salah satu fokus penting dalam teori efisiensi.

Aturan yang efisien harus dirancang untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara akurat. Dengan memahami tujuan dari aturan yang ditetapkan, kebijakan yang efektif dapat dibuat untuk mencapai hasil yang diharapkan tanpa menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Teori efisiensi mendorong kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan atau kebutuhan. Aturan yang kaku dan tidak responsif dapat menghambat kemampuan organisasi atau pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan situasi atau mencapai efisiensi yang optimal dalam jangka panjang<sup>26</sup>.

Aturan yang konsisten dan dapat diprediksi membantu menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diandalkan bagi individu dan organisasi. Ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk membuat keputusan yang lebih baik dan merencanakan tindakan mereka dengan lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem. Penting untuk memperhitungkan berbagai kepentingan dan perspektif yang terlibat, serta memastikan bahwa

---

<sup>25</sup> Adhi Anugroho, Ratih Lestari, and Tri Hayati, "Analisis Yuridis Terhadap Asas Efisiensi Berkeadilan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ketenagalistrikan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 2 (2017): 183, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no2.1451>.

<sup>26</sup> Anugroho, Lestari, and Hayati.

aturan tersebut memenuhi standar transparansi, keadilan, dan partisipasi yang memadai. Dengan demikian, teori efisiensi dapat menjadi panduan yang berharga dalam mengembangkan kebijakan yang lebih baik dan lebih efektif untuk masyarakat atau organisasi.

Konteks pemilihan umum (pemilu) di suatu negara, teori efisiensi dapat diterapkan untuk menentukan metode perhitungan suara yang paling tepat. Tujuan utama dari metode perhitungan suara adalah untuk mencerminkan keinginan pemilih seakurat mungkin dan untuk menciptakan hasil yang paling mewakili preferensi pemilih secara keseluruhan. Metode perhitungan suara harus menghasilkan representasi yang proporsional dari preferensi pemilih. Ini berarti bahwa partai atau kandidat yang mendapatkan dukungan yang signifikan dari pemilih harus memperoleh jumlah kursi atau kekuatan politik yang sebanding di dalam lembaga legislatif. Metode perhitungan suara harus mudah dipahami oleh pemilih dan memungkinkan hasil yang jelas dan tidak ambigu. Ini membantu mencegah kebingungan dan keraguan tentang hasil pemilu. Metode perhitungan suara juga harus efisien dalam hal waktu dan biaya<sup>27</sup>. Ini memungkinkan pengumuman hasil yang cepat dan penggunaan sumber daya yang minimal untuk administrasi pemilu. Metode perhitungan suara harus dirancang untuk mencegah atau meminimalkan kemungkinan manipulasi atau distorsi hasil oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Perhitungan suara harus memberikan insentif bagi pemilih untuk memberikan suara sesuai dengan preferensi mereka, tanpa mempengaruhi strategi yang tidak wajar seperti pemborosan suara.

Ada berbagai jenis sistem pemilihan yang digunakan di seluruh dunia, seperti sistem pemilihan mayoritas, proporsional, campuran, atau alternatif. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada konteks politik, budaya, dan kebutuhan negara tersebut. Tujuan utama adalah untuk memilih sistem yang paling efisien dalam mencapai tujuan demokratis yang diinginkan sambil memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi yang disebutkan di atas.

wewenang untuk menentukan metode perhitungan suara dalam pemilihan umum atau pemilu biasanya terletak pada badan pemerintah

---

<sup>27</sup> R Zulkarnain and I Ismaidar, "Politik Hukum Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science* ..., 2023, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7622>.

atau lembaga khusus yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum. Namun, pelaksanaan atau perubahan metode perhitungan suara bisa melibatkan proses legislasi atau pembaruan aturan pemilihan umum.

Badan pemilihan atau komisi pemilihan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia, National Election Commission (EC) di Korea Selatan, Independent High Electoral Commission (IHEC) di Iraq, memiliki tanggung jawab utama dalam menetapkan prosedur pemilihan, termasuk metode perhitungan suara. Kemudian metode perhitungan suara ditetapkan atau diubah melalui undang-undang atau peraturan yang disahkan oleh badan legislatif, seperti parlemen atau kongres. Pada beberapa kasus metode perhitungan suara dapat ditentukan melalui referendum, di mana pemilih secara langsung memutuskan tentang metode pemilihan yang akan digunakan. Inisiatif rakyat juga dapat memainkan peran dalam mengubah sistem pemilihan. Pemerintah eksekutif, seperti presiden atau perdana menteri, mungkin memiliki pengaruh atau kewenangan dalam menetapkan aturan atau kebijakan terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk metode perhitungan suara. Lazimnya digunakan oleh negara-negara demokrasi dalam penentuan metode perhitungan suara membutuhkan konsensus atau kesepakatan di antara berbagai pihak terkait, seperti partai politik, kelompok masyarakat sipil, dan pemilih. Kesepakatan ini sering kali mencerminkan dinamika politik, budaya, dan sejarah masing-masing negara.

Penentuan metode perhitungan suara dalam pemilihan umum merupakan aspek penting dalam memastikan integritas dan efektivitas proses demokratis. Teori efisiensi memainkan peran kunci dalam menentukan metode yang paling sesuai untuk mencapai tujuan demokrasi yang diinginkan. Artikel ini mengeksplorasi peran teori efisiensi dalam penentuan metode perhitungan suara dalam pemilihan umum, dengan fokus pada prinsip-prinsip efisiensi yang penting dalam proses tersebut<sup>28</sup>.

Salah satu aspek penting dari teori efisiensi dalam penentuan metode perhitungan suara adalah memastikan representasi yang

---

<sup>28</sup> Sri Warjiyati, "Penataan Struktur Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Di Indonesia.," *Aristo* 8, no. 1 (2020): 24, <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2403>.

proporsional dari preferensi pemilih. Metode perhitungan suara harus dirancang untuk menghasilkan distribusi kursi atau kekuatan politik yang mencerminkan dengan tepat dukungan pemilih terhadap berbagai partai politik atau kandidat.

Teori efisiensi juga menekankan pentingnya kejelasan dan keterbacaan dalam metode perhitungan suara. Metode tersebut harus mudah dipahami oleh pemilih dan memungkinkan hasil yang jelas dan tidak ambigu. Ini membantu mencegah kebingungan atau keraguan tentang hasil pemilihan.

Aspek lain dari teori efisiensi adalah efisiensi dalam hal waktu dan biaya. Metode perhitungan suara harus memungkinkan pengumuman hasil yang cepat dan menggunakan sumber daya yang minimal untuk administrasi pemilihan umum. Ini membantu mengurangi beban administratif dan biaya yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Teori efisiensi menekankan pentingnya mencegah atau meminimalkan kemungkinan manipulasi atau distorsi hasil oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Metode perhitungan suara harus dirancang untuk meminimalkan kerentanan terhadap praktik-praktik yang dapat mengarah pada distorsi hasil atau ketidakadilan dalam proses pemilihan<sup>29</sup>. Teori efisiensi menggarisbawahi pentingnya memastikan partisipasi pemilih yang maksimal dalam proses pemilihan umum. Metode perhitungan suara harus memberikan insentif bagi pemilih untuk memberikan suara sesuai dengan preferensi mereka tanpa khawatir tentang konsekuensi strategis yang tidak wajar. Melalui prinsip-prinsip efisiensi ini, penentuan metode perhitungan suara dalam pemilihan umum dapat menghasilkan proses pemilihan yang lebih adil, transparan, dan representatif, yang merupakan dasar dari sistem demokratis yang kuat. Melalui penerapan teori efisiensi, negara-negara dapat membangun fondasi yang kokoh untuk proses pemilihan umum yang efektif dan bermartabat.

## Penutup

Metode *Sainte Ligue* adalah cara pengkonversian suara dengan membagi menggunakan bilangan tertentu, Setiap partai politik memperoleh kursi pertamanya berdasarkan perbandingan suara yang diperolehnya, suara yang diperoleh oleh partai politik tersebut dibagi

---

<sup>29</sup> Staveren, "Efficiency."

dengan bilangan ganjil. Kuota Hare beroperasi dengan menggunakan kuota yang ditentukan berdasarkan jumlah suara yang diterima oleh setiap partai atau calon. Kuota ini adalah jumlah suara yang diperlukan bagi sebuah partai atau calon untuk mendapatkan satu kursi. Proses distribusi kursi dimulai dengan menghitung kuota Hare menggunakan rumus Jumlah suara di bagi dengan jumlah kursi.

Penentuan penggunaan metode dalam pengkonversian suara hasil pemilu ditentukan oleh pihak-pihak yang berwenang di Indonesia sendiri usulkan oleh KPU yang nantinya di setuju oleh legislatif dan eksekutif. *Sainte Lague* maupun *Kuota Hare* memiliki kekurangan dan kelebihan sehingga penentuan penggunaan salah satu metode didasarkan pada nilai efisiensi yang paling besar diantara dua metode tersebut. Indonesia dan Irak menggunakan metode *Sainte Lague* sedangkan Korea selatan menggunakan Metode *Kuota Hare*. Perbedaan pada penggunaan metode tersebut tidak didasari oleh struktur kekuasaan seperti bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, bentuk negara, maupun cabang kekuasaan. Melainkan besaran efektifitas dari suatu metode itu tersendiri. Besaran nilai efektifitas ini ditentukan oleh perspektif tiap negara, sehingga perbedaan penggunaan metode memang lumrah terjadi. Selain pengaruh yang disebutkan diatas, kondisi politik bisa menjadi alasan mengenai perubahan model pemilihan. Baik di negara seperti Indonesia, Iraq maupun Korea Selatan. Negara akan menentukan model yang cocok dan proporsional untuk digunakan dalam pemilihan di negaranya, apalagi negara dengan partai-partai politik yang besar penentuan model pemilihan harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati.

### Daftar Pustaka

- Al-Hamdi, R, B E C Widodo, and T Sulaksono. "Modul Praktikum A Tata Kelola Pemilu (Teknik Menghitung Suara Menjadi Kursi Di Pemilu 2019 Dengan Metode Sainte Lague (Murni))." *The Journal Publishing*, 2021.  
<http://thejournalish.com/ojs/index.php/books/article/view/152>.
- Antonioni, Peter, and Sean Masaki Flynn. *Economics for Dummies*. Chichester: John Wiley & Sons, 2011.

- Anugroho, Adhi, Ratih Lestarini, and Tri Hayati. "Analisis Yuridis Terhadap Asas Efisiensi Berkeadilan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ketenagalistrikan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 2 (2017): 183. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no2.1451>.
- Cooter, Robert, and Thomas Ulen. *Law and Economics*. (Boston: Addison Wesley, 2012).
- Fikri, Sultoni, and Anang Fajrul Ukhwaluddin. "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Iran." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (2022): 56–65. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.139>.
- Freeman, J R. "Decision Theory and Electoral Reform in Sweden: The Modification of the Sainte Lague Formula." *Comparative Political Studies*, 1977. <https://doi.org/10.1177/001041407701000207>.
- Hantoro, B F. "... METODE KONVERSI SUARA TERHADAP PROPORSIONALITAS PEROLEHAN KURSI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN ...." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2021.
- IMANI, IMANUR. ... *HASIL PEROLEHAN KURSI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PENGHITUNGAN SUARA SAINTE LAGUE DAN KUOTA HARE (Studi Pada Pemilu 2019 Di ....* [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id), 2021. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/60402>.
- kemenlu. "Republik Iraq," n.d.
- Latief, M I, R Muhammad, H Rahim, and ... "Implikasi Sosiologis Pemilu Di Indonesia." *Prosiding Konferensi ...*, 2023. <https://www.pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/91>.
- Mahardi, Y A. "... KETATANEGARAAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Kajian Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan)." *Repository.lainbengkulu.Ac.Id*, n.d.
- Majid, A, and A Sugitanata. "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi." *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2021. <http://qaumiyah.org/index.php/qaumiyah/article/view/18>.

- Mochammad Zia Ulhaq. *Retorika Dakwah Dalam Politik Studi Kasus Tgb Muhammad Zainul Majdi*. Tesis, 2019.
- Pratama, M Al Qautsar. "Kepemimpinan Dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Al-Khattab." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 2, no. 1 (2018): 59. <https://doi.org/10.30829/j.v2i1.1496>.
- PUTRI, A K. ... *METODE PENGHITUNGAN SUARA DENGAN MENGGUNAKAN HARE SYSTEM PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI DPRD KOTA YOGYAKARTA*. dspace.uui.ac.id, 2018.
- Ramadhanti, D N. "Demokrasi Dan Pemilu Indonesia Dalam Tinjauan Sosiologi Politik." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan ...*, 2022. <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1677>.
- Setiyono, B, M Adnan, and L Astrika. *Gerakan Anti Korupsi: Perbandingan Antara Korea Selatan Dan Indonesia*. books.google.com, 2024.
- Staveren, Irene van. "*Efficiency*." Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009.
- Sweinstani, M K D. "Formula Konversi Suara Sainte Lague Dan Dampaknya Pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Penelitian Politik*, 2020.
- Warjiyati, Sri. "Penataan Struktur Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Di Indonesia." *Aristo* 8, no. 1 (2020): 24. <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2403>.
- wiki. "Politics of Iraq," n.d.
- Zulkarnain, R, and I Ismaidar. "Politik Hukum Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science ...*, 2023. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7622>.